

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Renja ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan dan daya dukung sumberdaya alam yang ada guna kesejahteraan masyarakat.

Semoga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tarutung,

2023



**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**Ir. S.E.Y. PASARIBU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680513 199403 1 004**

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian dari wilayah otonom Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikelola demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara **“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan & Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”**. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tapanuli Utara ($\pm 80\%$) menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara dipandang dari segi potensi sumber daya alam yang ada memang lebih cocok dikelola untuk sektor pertanian. Dinas Pertanian memandang sektor pertanian dengan ketersediaan sumber daya alam sebagai salah satu potensi dalam meningkatkan kesejahteraan pertanian dengan menjadikan Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan, maka dalam mengimplementasikan kondisi dilakukan pembangunan pertanian dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu stakeholder dan pemerintah daerah kabupaten sebagai pemegang kebijakan daerah akan memberikan perkembangan kemakmuran yang nyata dan meninggalkan konsep lama yang hanya menjadikan masyarakat sebagai objek dari pembangunan.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki tersebut membutuhkan perencanaan pembangunan yang tepat dan terarah sehingga tujuan dan sasaran kinerja dapat dicapai serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kontribusi positif dalam sistem perencanaan daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebagai bagian instansi pemerintahan kabupaten juga tetap meningkatkan pelayanan dengan mempersiapkan perencanaan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan dengan prosedur bottom up, yakni dengan menampung aspirasi dan kebutuhan petani dengan menyesuaikannya dengan program kerja yang telah ditetapkan. Aplikasinya diwujudkan dalam Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan dengan

memperhatikan analisis faktor kekuatan, kendala , tantangan dan peluang pengembangan daerah yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2024 yang menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah Kabupaten Tapanuli Utara serta capaian yang dihasilkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian instansi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara, jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dairi, jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal; jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN Bappenas Nomor 050/4936/Sj, Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governnace);
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pengelolaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan aplikasi dan turunan dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, sekaligus sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan dan capaian kinerja. Disamping itu Rencana Kerja ini sebagai aplikasi secara makro dan mikro rencana

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara bidang Pertanian Tahun 2020-2024.

1. Tujuan dan Sasaran

Dinas Pertanian sebagai pelaksana pembangunan Pertanian di daerah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendukung dan menyelenggarakan pembangunan Pertanian, sedangkan sasaran pelaksanaan pembangunan pertanian Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara sumber daya alam yang dimiliki masyarakat melalui peningkatan produksi, peningkatan produktivitas dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

2. Rencana Strategis

Adapun rencana strategis ini mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yakni : ***“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan & Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”***. Visi ini merupakan cara pandang jauh kedepan, yang merefleksikan cita-cita, yakni hendak menjadi apa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara dimasa depan, dan sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan strategi dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain :

1. Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan produksi komoditas unggulan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan;
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Meningkatkan Produksi dan Ketersediaan Pangan beras secara berkelanjutan serta mempertahankan Swasembada Pangan;
5. Meningkatkan keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat perkapita dan menurunkan konsumsi beras;
6. Mengendalikan perkembangan Hama dan Penyakit yang mengganggu produksi dan produktivitas .

3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dinamika pencapaian kinerja terus mengalami perubahan yang positif, dimana pencapaiannya tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2024 ini tujuan utamanya tetap mengarah pada perbaikan daya dukung lingkungan hidup dengan mengurangi lahan kritis melalui Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Pengelolaan Hutan yang Berbasis kepada Masyarakat.

4. Kendala yang Dihadapi

Secara umum kendala yang dihadapi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 mencakup perubahan metode penyusunan yang mengadaptasi langsung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mana masih diperlukan sosialisasi agar SKPD dapat menelaah dan menuangkannya dalam penyusunan RENJA.

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan dimasa yang akan datang di daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) akar masalah yang selanjutnya merupakan masalah fundamental atau akar masalah pembangunan pertanian. Ketujuh masalah tersebut adalah : 1) Kepemilikan Lahan petani relative sempit dan tekanan alih fungsi lahan. 2) Lemahnya sistem perbenihan dan perbibitan. 3) Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air. 4) Lemahnya Kapasitas dan kelembagaan penyuluh. 5) Keterbatasan akses petani terhadap sumber permodalan. 6) Lemahnya peran kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya, dan 7) transfer teknologi berjalan lambat dan belum berkembangnya industri hilir.

Disamping itu penerapan perundangan-undangan yang masih sulit serta kelembagaan masyarakat dan pendanaan dalam pengelolaan sektor

pertanian masih bersifat parsial dan temporer bahkan sarana pendukung yang belum mencukupi.

5. Solusi Pemecahan

Memperhatikan kendala diatas, diharapkan penyusunan perencanaan pembangunan sektor pertanian ke depan memerlukan kebijakan dan langkah terobosan yang kongkrit dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan sehingga pemanfaatannya atas azas potensi dan tepat kelola untuk kesejahteraan masyarakat .

Terhadap beberapa langkah yang diambil untuk melaksanakan pembangunan pertanian yang mengacu pada potensi dan tepat kelola pada saat ini sampai masa akan datang akan memberi konsekuensi terhadap besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan, maka peningkatan alokasi anggaran biaya pembangunan pertanian pada masa yang akan datang sangat perlu. Namun selain pendanaan yang rutin (DAU/ DAK) diperlukan upaya kemitraaan dengan pihak swasta yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra OPD

Salah satu hasil pembangunan pertanian yang patut disyukuri dan membanggakan adalah Kabupaten Tapanuli Utara masih tetap mencapai swasembada pangan sehingga kebutuhan beras bagi penduduk Kabupaten Tapanuli Utara masih tercukupi, kondisi demikian sangat diharapkan terjaga terus untuk meghindari terjadinya krisis pangan.

Memperhatikan Rencana Strategis OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara maka dapat dilihat bahwa perlu adanya penyempurnaan materi guna mempertemukan antara format yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini dimaksudkan karena Renstra OPD telah disusun pada Tahun 2014. Namun demikian lingkup Program dan Kegiatan Bidang Pertanian telah terakomodir dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan menitik beratkan pada capaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (ouput). Mengacu pada hal tersebut maka Rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara telah mencapai target berdasarkan program dan kegiatan, bahkan terdapat beberapa kegiatan yang telah bersinergi dengan capaian kinerja yang lebih kompleks.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Rencana Strategi 2020-2024. Pengukuran kinerja ini

ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja out comes yang dikaitkan terhadap capaian sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai evaluasi untuk melihat perubahan kinerja organisasi yang mana lebih lanjut digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja dan memberikan solusi pemecahan permasalahan sekaligus sebagai bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis pada tahun mendatang.

Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Utara diukur berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam 4 (empat) tahun terakhir sekaligus tingkat pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh dengan kategori 'Baik'. Berdasarkan Capaian Kinerja tersebut maka kinerja akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada kinerja tahun yang akan datang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan pembangunan Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Pertanian tetap diperhadapkan pada isu strategis yang perlu dikelola penanganannya secara cermat. Adapun isu strategis dimaksud antara lain :

1. Konsepsi Otonomi Daerah

Sistem pengurusan pembangunan bidang pertanian di daerah yang masih lemah sebagai akibat kebijakan yang masih ditentukan oleh pusat. Hal ini terlihat dari ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban daerah, kekuasaan antara pemerintah daerah, lembaga legislatif dan masyarakat, tugas dan tanggungjawab, beban pekerjaan, anggaran yang tersedia dan prestasi birokrasi pemerintah daerah. Sehingga menjadi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran proaktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi sehingga pemerintah daerah dapat mengelola semua permasalahan sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga otonom.

2. Kemiskinan

Kabupaten Tapanuli Utara masih identik dengan peta kemiskinan. Penciptaan lapangan pekerjaan yang didominasi dari sektor pertanian belum memberikan gambaran perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat marginal di Tapanuli Utara. Hal ini dipicu dengan tingginya inflasi, terutama pada bahan makanan, transportasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

3. Ketersediaan Infrastruktur

Posisi strategis sebagai jalur mobilitas antar daerah kabupaten tetangga membutuhkan akses jalan yang tinggi. Disamping itu topografi Kabupaten Tapanuli Utara berada dalam wilayah pegunungan membutuhkan perhatian pengembangan infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya) sehingga mobilitas dalam pengelolaan pembangunan pertanian dan perkebunan dapat terselenggarakan.

4. Pengelolaan Potensi Daerah yang Belum Optimal

Potensi sumberdaya alam dari pertanian dan perkebunan hingga saat ini belum mendapat pengelolaan yang optimal. Pengelolaan ini perlu diupayakan secara tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat dan lingkungan ekosistemnya agar kelestarian tetap terjaga.

5. Wawasan Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat penggunaan pestisida dan zat kimia yang tinggi tidak terkendali menyebabkan terganggunya fungsi ekosistem. Degradasi kawasan pertanian dan perkebunan yang terjadi ini jika tidak dikendalikan akan memberikan dampak negatif pada kelestarian hasil dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Secara global akan memberikan perubahan lingkungan yang akan mengancam kehidupan manusia dan lingkungan ekosistem.

Dalam mengelola isu yang menjadi permasalahan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan ke depannya perlu dilakukan analisa dan asumsi guna memberikan solusi yang tepat sehingga dapat menjadi upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pokok dinas yang optimal.

Adapun solusi yang dapat diberikan dalam pengelolaan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi pengelolaan pertanian dan perkebunan;
2. Mendukung program Kementerian pertanian dalam mempercepat produksi , meningkatkan produktivitas dan menjaga keswasembadaan pangan dengan melibatkan masyarakat;
3. Peningkatan produksi hasil tanaman perkebunan rakyat dengan tidak mengesampingkan kualitas pasca panen;
4. Peningkatan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kerja yang baik akan selalu memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Dalam mewujudkan aplikasi perencanaan ini akan memenuhi dan memberlakukan tahapan pembahasan antar instansi pemerintah yang difasilitasi oleh Bappeda melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Forum OPD. Dalam proses ini akan mempertimbangkan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas pembangunan daerah yang menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Hingga sampai saat ini belum terdapat perbedaan rancangan kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD. Hal ini memberikan indikasi bahwa sistem perencanaan pembangunan telah membentuk suatu sistem yang cukup dipahami OPD. Apabila terdapat perbedaan penganggaran diperlukan pembahasan lanjutan dalam KUA –PPAS dan RKA oleh Tim Peneliti dan Tim Anggaran Kabupaten. Tahapan ini sangat penting guna penyelarasan anggaran kegiatan yang dapat diselenggarakan pada tahun yang direncanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan program dan kegiatan OPD maka diperlukan rekapitulasi usulan dan permohonan dari masyarakat umum, tanggapan LSM dan lembaga

pembangunan/ peneliti lainnya atas kinerja OPD dan hubungan kerjasama antar kabupaten/ kota dan provinsi serta pemerintah pusat. Namun demikian penyusunan program kerja juga tetap memperhatikan isu strategis yang berkembang yang dianggap dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah bidang Pertanian sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Pertanian.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2022 per Trivulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022					
					K	Rn	K	Rn	K	Rn	I		II		III				IV		K	Rn	K	Rn
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13% x 100%	15 = 14% x 100%									
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja yang dikeluarkan Inspektorat	Program Pemungjian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Layanan Administrasi	Persen	100	51.466.004.410	100	19.963.248.475	100	15.931.882.356	25	3.401.249.167,00	25	4.088.771.444,00	25	4.414.717.693,00	25	3.109.800.497,00	100	15.014.538.801	100	34.977.787.276	100,00%	67,96%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Persen	100	32.325.938	100	7.205.100	100	7.499.900	-	-	-	100	7.499.900,00	-	-	100	7.499.900	100	14.705.000	100,00%	45,49%	
Nilai : 72	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	32.325.938	3	7.205.100	1	7.499.900	-	-	-	1	7.499.900,00	-	-	1	7.499.900	4	14.705.000	80,00%	45,49%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jasa pelayanan penatausahaan keuangan	Persen	100	47.755.367.801	100	19.185.408.524	100	13.131.386.006	25	2.896.449.167,00	25	3.331.029.016,00	25	3.880.465.959,00	25	2.176.617.191,00	100	12.284.561.333	100	31.469.969.857	100,00%	65,90%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	47.482.330.002	24	19.122.356.224	12	13.049.346.206	3	2.896.449.167,00	3	3.292.883.416,00	3	3.855.383.559,00	3	2.157.805.391,00	12	12.202.521.533	36	31.324.877.757	60,00%	65,97%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	60	240.711.861	24	55.848.000	12	75.247.200	-	-	6	31.353.000,00	3	25.082.400,00	3	18.811.800,00	12	75.247.200	36	131.095.200	60,00%	54,46%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	5	32.325.938	1	7.204.300	1	6.792.600	-	-	1	6.792.600,00	-	-	-	-	1	6.792.600	2	13.996.900	40,00%	43,30%
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	131.710.524	2	30.558.400	1	10.000.000	-	-	-	1	9.930.000,00	-	-	1	9.930.000	3	40.488.400	60,00%	30,74%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	131.710.524	2	30.558.400	1	10.000.000	-	-	-	1	9.930.000,00	-	-	1	9.930.000	3	40.488.400	60,00%	30,74%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.927.972.789	100	401.669.620	100	648.112.100	-	50	216.895.213,00	25	178.718.042,00	25	245.004.978,00	100	640.618.233	100	1.042.287.853	100,00%	54,06%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	42.816.782	12	9.925.200	12	9.497.500	-	6	2.370.500,00	3	4.747.000,00	3	2.379.200,00	12	9.496.700	24	19.421.900	200,00%	45,36%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	193.955.194	12	44.968.200	12	85.428.500	-	6	41.236.300,00	3	19.871.600,00	3	24.212.700,00	12	85.320.600	24	130.288.800	200,00%	67,17%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bulan	12	43.087.889	12	9.994.300	12	27.996.700	-	6	13.963.000,00	3	13.060.000,00	3	968.200,00	12	27.991.200	24	37.985.500	200,00%	88,16%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	129.304.612	12	30.000.100	12	34.398.200	-	6	14.497.400,00	3	14.499.700,00	3	5.400.900,00	12	34.398.000	24	64.398.100	200,00%	49,80%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	258.592.415	12	50.200.000	12	59.996.500	-	6	14.155.000,00	3	14.300.000,00	3	29.040.000,00	12	57.495.000	24	107.695.000	200,00%	41,65%	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	79.461.465	12	7.584.300	12	78.806.700	-	6	10.351.800,00	3	49.191.600,00	3	14.531.800,00	12	74.075.200	24	81.659.500	200,00%	102,77%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	1.180.754.434	12	248.997.520	12	351.988.000	-	6	120.321.213,00	3	63.048.142,00	3	168.472.178,00	12	351.841.533	24	600.839.053	200,00%	50,89%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Peralatan Mesin Lainnya	Unit	20	222.594.251	3	36.750.000	10	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	36.750.000	15,00%	16,51%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan Mesin Lainnya	Unit	20	222.594.251	3	36.750.000	10	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	36.750.000	15,00%	16,51%		
		Penyediaan Jasa Pemungjian Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Tersedianya Jasa Pemungjian Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	646.679.087	100	120.362.273	100	1.994.949.000	25	504.800.000,00	25	476.159.410,00	25	318.711.425,00	25	658.658.928,00	100	1.958.329.763	100	2.078.692.036	100,00%	321,44%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	30.166.565	12	6.990.000	12	7.000.000	-	6	3.500.000,00	3	1.750.000,00	3	1.750.000,00	12	7.000.000	24	13.990.000	200,00%	46,38%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	223.558.426	12	22.448.292	12	35.199.800	-	6	4.659.410,00	3	5.961.425,00	3	8.352.289,00	12	18.973.124	24	41.421.416	200,00%	18,53%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	392.954.096	12	90.923.981	12	1.952.749.200	3	504.800.000,00	3	468.000.000,00	3	311.000.000,00	3	648.556.639,00	12	1.932.356.639	24	2.023.280.620	200,00%	514,89%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjian Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	749.354.022	100	181.294.558	100	139.935.350	-	50	64.687.805,00	25	19.392.567,00	25	29.519.400,00	100	113.599.572	100	294.894.130	100,00%	39,35%	
		Pemeliharaan Pajuk dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dilakukan Pemeliharaan	Unit	103	691.486.284	103	167.917.558	103	129.997.550	-	50	59.021.605,00	20	15.120.767,00	33	29.519.400,00	103	103.661.772	103	271.579.330	100,00%	39,27%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40	57.867.738	10	13.377.000	10	9.937.800	-	5	5.666.200,00	5	4.271.600,00	-	-	10	9.937.800	20	23.314.800	50,00%	40,29%	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	Persen	46	50.627.565.709	6.653.375.483	7.109.059.850	-	417.467.093,00	3.645.017.258,00	2.576.139.905,00	0	6.638.624.256	0	13.291.999.739	0,00%	26,25%						
		Padli Sawah		Ton	118.800,00		118.400,00						118.426,70		100,02%		99,69%		99,69%					
				Kwh	49,65		49,63						52,65		106,09%		106,04%		106,04%					
		Padli Ladang		Ton	70.600,00		70.200,00						70.255,45		100,08%		99,51%		99,51%					
				Kwh	29,69		29,68						29,69		100,03%		100,00%		100,00%					

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.
2. Kebijakan pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor serta komoditas penyedia bahan baku bio-energi.
3. Kebijakan peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan.
4. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro-industri di perdesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan.
5. Kebijakan re-orientasi memproduksi dari satu jenis produk menjadi multi produk (produk utama, bioenergi, produk sampingan, produk dari limbah, *zero waste* dan lainnya).
6. Kebijakan pengembangan klaster/kawasan, yaitu pada kawasan tertentu yang mengungkit pencapaian target nasional.
7. Kebijakan sistem perbenihan/pembibitan, perlindungan petani, kelembagaan petani, inovasi dan diseminasi teknologi, penyuluhan, dan kebijakan sistem perkarantinaaan pertanian.
8. Kebijakan mendukung program tematik: MP3EI, MP3KI, PUG, KSS, ketenagakerjaan, percepatan daerah tertinggal, kawasan khusus dan wilayah perbatasan. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanganan pasca bencana alam.
9. Kebijakan subsidi: (1) subsidi pupuk tetap diperlukan dengan cara mengurangi pupuk tunggal, menaikkan subsidi pupuk majemuk, (2) pupuk organik tetap dikembangkan bukan dengan dukungan subsidi, tetapi dialihkan menjadi kegiatan pengembangan pupuk organik, (3)

subsidi benih ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan penguatan penangkar benih/bibit.

10. Kebijakan kredit : (1) kredit ketahanan pangan akan terus dilanjutkan untuk mendorong dan meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung ketahanan pangan, (2) untuk lebih menjamin teralokasinya kredit untuk pangan, maka plafon kredit dialokasikan menurut subsektor, (3) untuk memecahkan kelangkaan tenaga kerja & menjamin pengelolaan pangan skala luas, maka Kredit Mekanisasi pertanian sangat diperlukan, (4) kegiatan sertifikasi tanah diperlukan, sehingga layak kredit.

Strategi Pembangunan Pertanian tahun 2019-2024 meliputi :

1. Menjadikan basis produksi komoditas pangan, komoditas ekspor, penyedia bahan baku industri dan bio-energi dengan pendekatan kawasan.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian.
3. Menyediakan prasarana dasar bidang pertanian
4. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara rinci uraian mengenai pengembangan pertanian dan perdesaan, dijelaskan dalam enam bidang program, yaitu:

- A. Pengkajian kebijakan, perencanaan dan program terpadu pertanian.
- B. Perbaikan produksi pertanian dan sistem bertani melalui diversifikasi usaha tani.
- C. Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- D. Konservasi dan rehabilitasi tanah.
- E. Pengendalian hama terpadu (PHT).
- F. Unsur hara bagi peningkatan produksi pangan.

Memperhatikan hal di atas maka arah kebijakan strategi pembangunan pertanian dan perkebunan ke depan bertujuan untuk

pengelolaan sumber daya alam yang memiliki potensi pertanian secara tepat dengan tujuan peningkatan pendapatan petani yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai salah satu institusi pemerintahan untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai perwujudan tanggung jawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
							2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan									
	Menurunnya Daerah Rentan Pangan		Persentase Desa/Kelurahan Rentan Pangan	Persen	NA	NA	18,25	13,89	9,52	5,16
		Meningkatnya Produksi dan produktivitas pangan	Produksi Tanaman Pangan	Ton						
			Padi Sawah	Ton	113.938	118.204	118.250	118.400	118.600	118.800
			Padi Ladang	Ton	66.275	75.787	70.000	70.200	70.400	70.600
			Jagung	Ton	89.087,85	124.117,86	82.000,00	85.000	88.000	91.000
			Produktivitas Tanaman	Kw/ha						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
							2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pangan							
			Padi Sawah	Kw/ha	49,60	49,62	49,62	49,63	49,64	49,65
			Padi Ladang	Kw/ha	29,66	29,66	29,67	29,68	29,69	29,69
			Jagung	Kw/ha	51,73	51,73	51,78	51,82	51,86	51,89
			Produksi Daging	Ton	1.396	2.281	2.335	2.387	2.437	2.487
			Populasi Ternak	Ekor						
			Kerbau	Ekor	9.600	9.767	9.787	9.797	9.837	9.877
			Babi	Ekor	62.350	3.005	3.055	3.105	3.155	3.205
		Meningkatnya Kelompok Tani yang dibina	Persentase kelompok tani yang melakukan pertemuan rutin	Persen	60	65	70	75	80	85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
							2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatmy a sarana Pertanian yang Baik	Persentase Jumlah pertanian yang baik	Persen	40	45	50	55	60	60
	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektro Pertanian		Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Milyar Rupiah	2.601,04	2.660,74	2.721,52	2.783,38	2.845,24	2.907,10
		Meningkatny a Produksi dan Produktivitas Komoditi	Produksi dan Produktivitas komoditi unggulan per hektar per tahun							

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
							2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Unggulan								
			Jagung	Ton	89.087,85	124.117,86	82.000,00	85.000	88.000	91.000
				Kw/ha	51,73	51,73	51,78	51,82	51,86	51,89
			Kacang Tanah	Ton	1.370,14	2.452,47	2.459,00	2.484,00	2.501,00	2.518,00
				Kw/ha	15,35	15,35	15,38	15,41	15,44	15,47
			Bawang Merah	Ton	648,70	476,00	920,00	971,25	1.023,00	1.075,25
				Kw/ha	69,01	91,54	92,00	92,50	93,00	93,50
			Cabe Merah	Ton	5.381,30	6.222,40	6.454,00	6.648,15	6.830,20	7.028,45
				Kw/ha	44,15	45,62	46,10	47,15	48,10	49,15
			Nenas	Ton	134.096,90	155.139,20	157.107,50	158.620,80	160.200,00	162.105,00
				Kw/ha	1.591,05	1.585,60	1.595,00	1.599,00	1.602,00	1.605,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Realisasi Tahun	Target Tahun . .			
							2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pisang	Ton	2.100,00	4.174,10	12.050,00	24.112,00	36.180,00	48.280,00
				Kw/ha	562,85	601,62	602,50	602,80	603,00	603,50
			Kopi	Ton	14.336,74	14.663,94	14.698,50	14.752,30	14.780,50	14.810,85
				Kg/ha/tahun	1.078,24	1.100,45	1.105,70	1.108,50	1.121,60	1.125,20
			Kakao	Ton	1.776,67	1.778,89	1.781,60	1.789,90	1.790,50	1.792,65
				Kg/ha/tahun	665,11	657,75	659,25	661,20	662,60	663,25
			Aren	Ton	178,44	178,91	179,50	181,00	183,00	185,00
				Kg/ha/tahun	601,01	509,72	509,75	509,78	509,80	509,82
		Meningkatnya Perluasan Lahan Produktif	Persentase Lahan Produktif	Persen	78	79	80	81	82	83

C. Program dan Kegiatan

Secara umum Rencana Kerja Tahun 2022 OPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dan Rencana Strategis OPD dan seoptimal mungkin untuk mendukung dan melanjutkan program pembangunan Pertanian dengan mendasari Capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang memperhatikan pendayagunaan potensi ekonomi daerah dalam bidang pertanian.

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF / ENTRI SIPD RI	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PERTANIAN			33.114.581.440	
1	1.03.10 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		17.302.567.901	
	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		131.013.000	
	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD	56.010.000	2 DOKUMEN
	3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PAD	5.000.000	2 DOKUMEN
	3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PAD	5.000.000	1 DOKUMEN
	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD	65.003.000	12 DOKUMEN
	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.844.745.389	
	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU BEBAS	14.779.306.189	1 TAHUN
	3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DBH BEBAS	60.439.200	12 BULAN
	3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PAD	5.000.000	1 DOKUMEN
	3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		7.000.000	
	3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD	7.000.000	4 DOKUMEN
	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		208.798.200	
	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD	2.000.000	12 BULAN
	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	40.000.000	1 PAKET
	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD	2.000.000	12 BULAN
	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD	20.813.200	12 BULAN
	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD	143.985.000	12 BULAN
	3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.000.000	
	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	14.000.000	4 UNIT PRINTER
	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.531.423.212	
	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PAD	2.000.000	12 BULAN
	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DBH BEBAS	39.705.700	12 BULAN
	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DBH BEBAS	1.489.717.512	12 BULAN
	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		565.588.100	
	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DBH BEBAS	55.588.100	4 KENDARAAN DINAS RODA 4
	3.27.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DBH BEBAS	500.000.000	10 UNIT TRAKTOR BESAR
	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	10.000.000	10 UNIT
2	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		3.291.887.599	
	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		2.391.887.599	
	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1.811.887.599	
	Pengadaan Cultivator di Kabupaten Tapanuli Utara (DID)	INSENTIF FISKAL	280.000.000	11 UNIT
	Pengadaan Power Sprayer (DID)	INSENTIF FISKAL	120.000.000	10 UNIT
	Pengadaan Hand Spayer Untuk Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	400.000.000	376 UNIT
	Pengadaan Hand Sprayer Tanaman Tembakau (DBHCT)	DBHCT	185.923.000	175 UNIT
	Pekarangan Pangan Lestari P2L (DAK Non FISIK)	DAK NON FISIK	650.000.000	10 KELOMPOK TANI DESA STUNTING

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF / ENTRI SIPD RI	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PERTANIAN			33.114.581.440	
	Pengadaan Pupuk NPK dan Biopestisida Untuk Pertanaman Tembakau (DBHCT)	DBHCT	175.964.600	Biopestisida Trichoderma Sp/Trichoizium 500 KG, PUPUK NPK 5.000 KG
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			240.000.000	
	Pelatihan Penerima Bantuan Alsintan (DID)	INSENTIF FISKAL	140.000.000	
	- Pameran Pertanian Luar Daerah	PAD	26.000.000	1 PAMERAN
	- Penyediaan Jasa Operasional UPTD Alsintan	PAD	16.000.000	12 BULAN
	- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura	PAD	16.000.000	15 KECAMATAN
	- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Tanaman Perkebunan	PAD	16.000.000	15 KECAMATAN
	- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Tanaman Pangan	PAD	16.000.000	15 KECAMATAN
	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tapanuli Utara (MPIG-KATU)	DBH BEBAS	10.000.000	1 ORGANISASI
3.27.02.2.01.0008 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang			340.000.000	
	- Pembibitan Tanaman Kopi di Kabupaten Tapanuli Utara (DID)	INSENTIF FISKAL	190.000.000	68.800 BATANG
	Pembibitan Kakao di Kecamatan Pahae jae dan Pahae Julu (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	150.000.000	49.000 BATANG
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			900.000.000	
3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			900.000.000	
	- Pengadaan Benih Bawang Merah untuk Ekstensifikasi (DID)	INSENTIF FISKAL	150.000.000	Pupuk Organik POG 1.600 KG, Benih Bawang Merah 2.150 KG
	- Pengadaan Benih Jagung Untuk Kecamatan Pahae Jae dan Pahae Julu (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	120.000.000	Benih Jagung Hibrida 715 KG
	- Pengadaan Benih Kacang Tanah untuk Ekstensifikasi (DID)	INSENTIF FISKAL	130.000.000	Benih Kacang Tanah 3.170 KG
	Pengadaan Benih Padi Sawah Untuk Kecamatan Pahae Jae dan Pahae Julu (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	200.000.000	Benih Padi Sawah 12.600 KG
	Pengadaan Bibit Manggis Untuk Kecamatan Pahae Jae dan Pahae Julu (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	150.000.000	Bibit Manggis 3.270 Batang
	Pengadaan Benih Bawang Merah Untuk Kecamatan Pahae Jae dan Pahae Julu (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	150.000.000	Pupuk Organik POG 1.600 KG, Benih Bawang Merah 2.150 KG
3 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			10.823.826.000	
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			635.000.000	
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya			350.000.000	
	- Operasional Pengamat Curah Hujan	PAD	10.000.000	12 BULAN
	Pendataan Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Tapanuli Utara (DBH SAWIT)	DBH SAWIT	200.000.000	12 BULAN
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Perkebunan	PAD	10.000.000	12 BULAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Hortikultura	PAD	14.000.000	12 BULAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Data Statistik Tanaman Pangan	PAD	16.000.000	12 BULAN
	- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Sawit	DBH SAWIT	100.000.000	1 Dokumen
3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			285.000.000	
	Penyediaan Operasional Pengolahan Lahan Gratis Masyarakat Dengan Mekanisasi (DID)	INSENTIF FISKAL	285.000.000	104 Ha
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			10.188.826.000	
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			4.000.000.000	
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipoholon (Lokasi I)	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Pagaran Lambung IV Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF / ENTRI SIPD RI	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PERTANIAN			33.114.581.440	
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Lobu Pining Kecamatan Pahae Julu	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Pangurdotan Kecamatan Pahae Julu	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Banuaji IV Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Parsaoran Janji Angkola Kecamatan Purbatua	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Pardomuan Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Pardamean Nainggolan Kecamatan Pahae Jae	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Hutauruk Hasundutan Kecamatan Sipoholon	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Pagaran Lambung I Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Pansur Batu I Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Partali Julu Kecamatan Tarutung	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipoholon (Lokasi II)	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani Hortikultura di Desa Situmeang Habisan Kecamatan Sipoholon (Lokasi II)	DAK FISIK	200.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan di Desa Banuaji I Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun I Desa Pariksabungan Kecamatan Siborongborong	PAD	100.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani di Dusun Golat Salib Kasih Menuju Jalan Pea Tolong Desa Simorangkir Julu Kecamatan Siatas Barita	PAD	100.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Jalan Usaha Tani di Hasang Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung	PAD	100.000.000	1 LOKASI
	3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Damparit Pertanian		240.000.000	
	- Pembangunan Damparit di Desa Pagaran Pisang Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	120.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Damparit di Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan	DAK FISIK	120.000.000	1 LOKASI
	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		50.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya BPP Sipahutar (DAK FISIK)	DAK FISIK	50.000.000	1 BPP SIPAHUTAR
	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		500.000.000	
	Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Buah di Kecamatan Tarutung	DAK FISIK	500.000.000	1 UNIT
	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		5.398.826.000	
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Hortikultura di Desa Hasibuan Kecamatan Pagaran	DAK FISIK	150.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Paniaran Kecamatan Siborongborong	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Hortikultura di Desa Sisordak Kecamatan Parmonangan (Lokasi I)	DAK FISIK	150.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Hortikultura di Desa Sisordak Kecamatan Parmonangan (Lokasi II)	DAK FISIK	150.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Hortikultura di Desa Sisordak Kecamatan Parmonangan (Lokasi III)	DAK FISIK	159.384.700	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Siabal Abal I Kecamatan Sipahutar (Lokasi I)	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Siabal Abal I Kecamatan Sipahutar (Lokasi II)	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipoholon (Lokasi I)	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Lumban Tonga Tonga Kecamatan Siborongborong	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Siaro Kecamatan Siborongborong	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipoholon (Lokasi II)	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Manalu Dolok Kecamatan Parmonangan	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Aek Raja Kecamatan Parmonangan	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF / ENTRI SIPD RI	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PERTANIAN			33.114.581.440	
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Sipoholon Kecamatan Sipoholon	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Sibalanga Kecamatan Garoga	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Parsosoran Kecamatan Garoga	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Tanaman Pangan di Desa Dolok Saribu Kecamatan Pagaran	DAK FISIK	300.000.000	1 LOKASI
	Dana Penunjang DAK FISIK 2024	DAK FISIK	489.441.300	1 TAHUN
	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam di Dusun Rambasiala Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga	PAD	100.000.000	1 LOKASI
5	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		305.000.000	
	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		305.000.000	
	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		305.000.000	
	Penyediaan Jasa Operasional UPTD LAB	PAD	10.000.000	12 BULAN
	- Pelatihan Pembuatan dan Pengembangan Produk Agens Hayati di Kecamatan Pahae Jae dan Pahae Julu (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	130.000.000	300 PETANI
	- Penyediaan Bahan Pembuatan dan Pengembangan Produk Agens Hayati (DID)	INSENTIF FISKAL	65.000.000	8 JENIS AGENS HAYATI
	Pelatihan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	100.000.000	90 ORANG
6	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		125.000.000	
	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		125.000.000	
	3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		125.000.000	
	- Jasa Operasional Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida	PAD	125.000.000	12 BULAN
7	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.266.299.940	
	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.266.299.940	
	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		695.400.000	
	- Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh Pertanian	PAD	45.000.000	12 BULAN
	Rapat Teknis Penyuluh Pertanian Tingkat Kabupaten	PAD	80.000.000	12 BULAN
	Bantuan Transport Penyuluh Pertanian Non ASN	PAD	560.400.000	12 BULAN (Koordinator 500rb dan PPL 200rb Per Bulan)
	Komisi Penyuluhan Pertanian (KPP) Kabupaten Tapanuli Utara	DBH BEBAS	10.000.000	1 ORGANISASI
	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		545.899.940	
	- Penilaian Kemampuan Kelas kelompok Tani (DID)	INSENTIF FISKAL	40.000.000	100 POKTAN
	Pelaksanaan Demplot Petani di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	150.000.000	2 KECAMATAN
	Pelatihan Petani Tematik/Teknologi Budidaya (DID)	INSENTIF FISKAL	100.000.000	15 KECAMATAN
	Pelatihan Pupuk Organik di Kecamatan Pahae Jae dan Pahae Julu (Bonus Produksi)	BONUS PRODUKSI	150.000.000	428 ORANG
	Kelompok Tani Agro Petani Kopi Siharbang (APEKSI)	DBH BEBAS	10.000.000	1 ORGANISASI
	Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	DBH BEBAS	10.000.000	1 ORGANISASI
	Belanja Hibah Ke STSU	DBH BEBAS	10.000.000	1 ORGANISASI
	Pembuatan Akte Notaris Kelompok Tani	PAD	75.899.940	58 AKTE NOTARIS POKTAN
	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		25.000.000	
	Penyediaan Sarana Mobiler di BPP Tarutung, BPP Siborongborong dan BPP Sipoholon	PAD	25.000.000	3 BPP

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF / ENTRI SIPD RI	OUTPUT KEGIATAN
DINAS PERTANIAN		33.114.581.440	
TOTAL PAGU			

PAD	1.836.297.940
DBH BEBAS	2.198.263.612
DAU BEBAS	14.779.306.288
INSENTIF FISKAL	1.500.000.000
BONUS PRODUKSI	1.700.000.000
DBH CHT	361.887.600
DBH SAWIT	300.000.000
DAK NON FISIK	650.000.000
DAK FISIK	9.788.826.000
TOTAL	33.114.581.440

BAB IV

PENUTUP

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, dengan harapan untuk dapat menjadi kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang optimal dan bersinergi dengan Program Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat menjadi salah satu perwujudan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan penganggaran daerah berdasarkan skala prioritas usulan program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya dalam aplikasinya tetap memenuhi peraturan dan aturan pelaksanaan anggaran yang berlaku dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Melalui sarana Musyawarah Pembangunan Tahun 2022 agar menjadi forum sinkronisasi rencana kegiatan tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan pemutahiran sistem perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara khususnya.

Masukan dan saran dalam pelaksanaan penyusunannya akan lebih dipertimbangkan dalam penyempurnaan rencana kegiatan pada masa yang akan datang dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam Institusi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan kerangka regulasi yang ada.

Tarutung,

2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA



Ir. **ASARIBU, MSi**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680513 199403 1 004